

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan standar belanja yang dilakukan menunjukan 3 program dengan 6 kegiatan yang secara berturut-turut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengalami *Underfinance* atau terdapat selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan perhitungan standar belanja.
2. Berdasarkan hasil dalam pembahasan adapun selisih pada Program/Kegiatan dari yang terendah hingga tertinggi dimulai dari program/kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selisihnya paling sedikit yaitu sebesar Rp 71.595.162 dan pada Program/kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah selisihnya paling besar yaitu sebesar Rp 568.413.567. Kemudian, pada Program/Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selisihnya sebesar Rp 356.372.146 dan pada Program/Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk

UMKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota selisihnya sebesar Rp 355.303.028. Pada Program/Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terjadi selisih sebesar Rp 354.590.285 dan pada Program/Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terjadi selisih sebesar Rp 238.769.338.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti melalui hasil penelitian yaitu:

6.2.1 Bagi Rumah Sakit Umum Daerah SoE

Bagi Rumah Sakit Umum Daerah SoE dianjurkan untuk berpedoman pada standar biaya dalam menganalisis dan meminimalisir anggaran pada setiap objek belanja agar perencanaan dan penyusunan penganggaran pada masa mendatang kinerjanya terukur.

6.2.2 Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dianjurkan untuk memberikan sosialisasi dan mendorong kepada Kepala OPD agar menggunakan ASB pada Perencanaan dan Penyusunan DPA-OPD sehingga pada masa mendatang anggaran dapat diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan.

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian sejenis pada instansi pemerintah daerah lainnya agar dapat melakukan perhitungan standar belanja untuk penilaian kewajaran anggaran pada unit kerja lainnya.